

Rp. 25.000,-

SUARA DARI BOGOR

**SISTEM DAN USAHA
AGRIBISNIS**

KACAMATA SANG PEMIKIR

SMH Tampubolon

Diterbitkan
Untuk Melestarikan Buah Karya Sang Pemikir

SUARA DARI BOGOR
SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS
KACAMATA SANG PEMIKIR

Penulis
S.M.H. Tampubolon

Editor
Hariato
Rachmat Pambudy
Tungkot Sipayung
Burhanuddin

Pengantar
Menteri Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, MEd.



Edisi pertama, Maret 2002

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Setting dan layout oleh Dedin Rohaedin

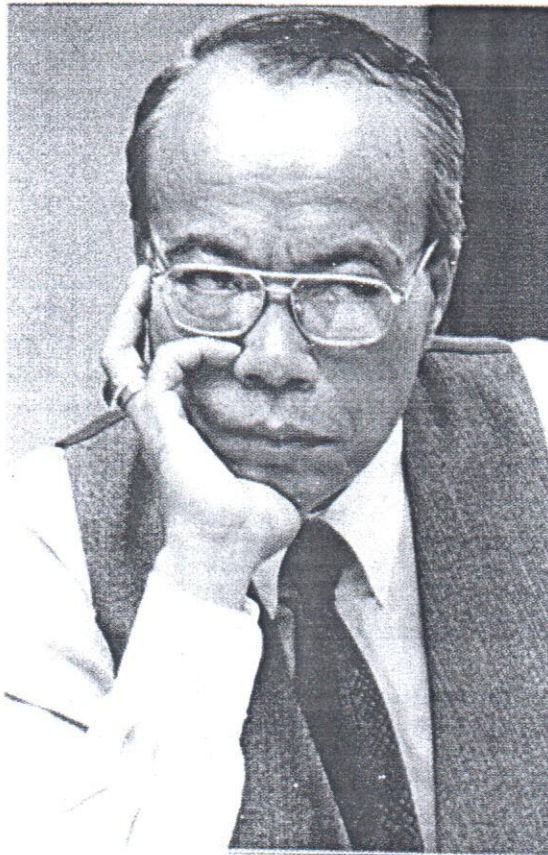
Desain sampul oleh Burhanuddin

Diterbitkan oleh Pusat Studi Pembangunan IPB dan USESE Foundation

ISBN : 979-3099-02-x

IN MEMORIAM

Mengenang,



Dr. Ir. Sakti Mangatas Hamonangan Tampubolon, MSc.

(21 Januari 1942 - 27 Juli 2001)

Dosen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB

Wakil Kepala Pusat Studi Pembangunan LP-IPB

Pemikir dan Penulis

RIWAYAT HIDUP

Alm. Dr. Ir. Sakti Mangatas Hamonganan Tampubolon, MSc.

Beliau dilahirkan di Kutabuluh pada tanggal 21 Januari 1942. Meninggal dunia di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2001 pukul 18.30 WIB, karena sakit.

Riwayat Pendidikan

Menamatkan Sarjana Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1976. Mengikuti pendidikan Magister Sains Ekonomi Pertanian di University of Philippines at Los Banos sampai 1983. Meraih gelar Doktor Ekonomi Pertanian di University of Philippines at Los Banos pada tahun 1989.

Riwayat Pekerjaan

1. Guru SMA Mardi Yuana Bogor, 1964-1975
2. Dosen Fakultas Pertanian IPB sejak 1975
3. Peneliti Senior di Yayasan USESE, 1986-1988
4. Asisten Kepala PSP- IPB sejak tahun 1993
5. Wakil Kepala PSP-IPB sejak 1995
6. Sebagai Konsultan/Senior Adviser di berbagai proyek dalam dan luar negeri.

Keaktifan/Pengalaman Organisasi

1. Anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) hingga kini.
2. President elect, UPLB International Students' Association, Inc., 1984-1985
3. Philippines Agricultural Economics and Development Association, Inc. 1985-1986
4. Anggota dari Initiative for Development for Environmental Alliance Through Leadership (IDEAL)
5. Anggota Pengurus Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia; Bidang Ekonomi.
6. Sub-Komisi Pertanian dan Pangan, Komisi Industrialisasi, Komite Reformasi Teknologi dan Industrialisasi (KARTI).
7. Anggota Serikat Tani Indonesia (SERTANI), Lampung.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**KATA SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN**

Sejak saya diangkat menjadi Menteri Pertanian RI, pemasyarakatan pemikiran pembangunan agribisnis lewat SUARA DARI BOGOR yang diterbitkan Harian Umum Suara Pembaharuan, saya serahkan kepada Almarhum Dr. Ir. SMH Tampubolon, MSc. Kurang lebih satu tahun hingga beliau meninggal, beliau telah menghasilkan karya-karya terbaiknya yang libukukan dalam buku ini. Hal yang sangat mengharukan adalah sampai detik-detik terakhir hidup beliau, beliau masih tetap memberikan perhatian pada pentingnya pembelajaran masyarakat tentang agribisnis melalui SUARA DARI BOGOR. Karena itu, saya menyambut literbitkannya buku ini sebagai penghargaan dan penghormatan kepada beliau, sekaligus menyebarkan semangatnya mengembangkan agribisnis kepada masyarakat.

Dalam rangka membangun sistem dan usaha agribisnis di Indonesia kita memerlukan banyak pemikir yang kritis selain pelaku agribisnis itu sendiri. Tidak hanya pemikir yang kritis tetapi juga pemikir yang bersedia menuliskan pikiran-pikirannya sehingga dapat dipelajari dan dikritisi ulang oleh pemikir baru dari generasi muda. Tradisi seperti itu perlu kita kembangkan agar kita dapat "melihat dunia yang lebih luas" dan melihat berbagai alternatif dalam memperbaiki cara kita membangun agribisnis. Karena itu saya mengundang dan mengharapkan lebih banyak pemikir dan penulis agribisnis khususnya dari generasi muda.

Saya berharap dengan diterbitkannya buku seri kedua SUARA DARI BOGOR ini dapat merangsang penulis baru dan menjadi salah satu referensi bagi mengambil keputusan, pemikir dan pelaku dibidang agribisnis.


Menteri Pertanian

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, MEd

DAFTAR ISI

**PENGANTAR MENTERI PERTANIAN RI,
Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.**

v

1 MODERNISASI PEMBANGUNAN SISTEM AGRIBISNIS

| | |
|---|----|
| 1. Harapan Kita dari Menteri Pertanian dan Kehutanan yang Baru | 1 |
| 2. Pendanaan Agribisnis | 5 |
| 3. Penghambat Kemajuan | 9 |
| 4. Lima Poros <i>Team Work</i> Pembangunan Sistem Agribisnis | 13 |
| 5. Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Industri | 16 |
| 6. Membangun Agribisnis yang Berdaya Saing | 19 |
| 7. Pentingnya Pengembangan Sistem Informasi dalam Pengembangan Agribisnis | 22 |
| 8. Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dan Pengembangan Agribisnis | 25 |
| 9. Orientasi Penyuluhan dalam Pengembangan Agribisnis | 29 |
| 10. Membangun Fundamental Agribisnis Kelautan | 33 |
| 11. Pembangunan Agribisnis yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal | 37 |

2 KEBIJAKAN DAN TANTANGAN MASALAH PANGAN

| | |
|--|----|
| 1. Diperlukan Kebijakan Beras Jangka Panjang | 41 |
| 2. Harga Dasar Gabah dan Dampak Distributifnya | 45 |
| 3. Harga Dasar Gabah yang Tidak Masuk Akal | 49 |
| 4. Bertani Padi Makin Ringan, Pendapatan Riil Berkurang | 53 |
| 5. Membangun Lumbung Hortikultura di Daerah | 56 |
| 6. Penganekaragaman Pangan dalam Pemantapan Ketahanan Pangan | 59 |
| 7. <i>The Lost Generation</i> : dan Kebijakan Perberasan | 62 |

vii

| | |
|--|----|
| 8. Koordinasi Ketahanan Pangan | 66 |
| 9. Defisit Komoditas Pangan di Indonesia: Suatu Ancamankah? | 70 |
| 10. "Swasembada" Kedelai: Mungkinkah? | 74 |
| 11. Kenaikan Harga BBM, Harga Pangan dan Ketahanan Pangan Petani | 78 |
| 12. Rekapitalisasi Sektor Agribisnis Pangan | 82 |

3 PEMBANGUNAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DAERAH

| | |
|--|----|
| 1. Tanpa Reformasi Perbankan Otonomi Daerah Omong Kosong | 85 |
| 2. Tonggak Baru | 89 |
| 3. Retribusi Dapat Mengancam Otonomi Daerah | 92 |
| 4. Pengembangan Agribisnis dan Pembangunan Ekonomi Daerah | 95 |
| 5. Kaji Ulang Kebijakan Pemerintah Pusat yang Tidak Konstitusional dalam Kerangka Otonomi Daerah | 99 |

4 DILEMA TANAH DAN PETANI

| | |
|---|-----|
| 1. Menanti Kebijakan Reforma Agraria | 103 |
| 2. Tanah dan Petani: Dilema di Kawasan Asia Timur, Selatan dan Tenggara | 106 |
| 3. Perwilayahan Pertanian, Agropolitan dan Pertanian Kota | 109 |

5 EKONOMI PETANI EKONOMI KERAKYATAN

| | |
|--|-----|
| 1. Ekonomi Rakyat | 113 |
| 2. Kredit untuk Petani | 116 |
| 3. Pemanfaatan Pasar Ekspor bagi PKM Agribisnis | 120 |
| 4. Memahami Perkembangan Desa | 123 |
| 5. Jalan Menuju Peningkatan Pendapatan Petani | 128 |
| 6. Monopolist dan Semacamnya: Musuh dalam Ekonomi Pasar | 130 |
| 7. <i>Free-Fight Liberalism</i> : Penyebab Ekonomi Pasar Tidak Efisien dan Tidak Optimal | 133 |

| | |
|---|-----|
| 8. Kredit Usahatani (Kut): Mengapa Terus-Terusan Macet? | 137 |
| 9. Kredit Murah Bagi Petani? | 141 |

6 INOVASI BARU TEKNOLOGI PERTANIAN

| | |
|--|-----|
| 1. Palm Oil-Diesel sebagai Energi Masa Depan | 145 |
| 2. Agro-Transgenik : Bagaimana Sikap Indonesia ? | 148 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| BIODATA SINGKAT EDITOR | 151 |
|-------------------------------|-----|

1

**Modernisasi
Pembangunan
Sistem Agribisnis**



1. HARAPAN KITA DARI MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG BARU
2. PENDANAAN AGRIBISNIS
3. PENGHAMBAT KEMAJUAN
4. LIMA POROS *TEAM WORK* PEMBANGUNAN SISTEM AGRIBISNIS
5. PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
6. MEMBANGUN AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING
7. PENTINGNYA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
8. AMANDEMEN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
9. ORIENTASI PENYULUHAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
10. MEMBANGUN FUNDAMENTAL AGRIBISNIS KELAUTAN
11. PEMBANGUNAN AGRIBISNIS YANG BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

HARAPAN KITA DARI MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG BARU

Dengan sudah dilantiknya Kabinet yang baru Pasca ST MPR tahun 2000, maka di depan kita segera menghadang berbagai masalah baik yang ditinggalkan oleh pemerintahan orde baru, maupun berbagai masalah yang belum bisa dituntaskan selama masa Kabinet Persatuan Nasional. Demikian juga sejumlah tantangan perlu dijawab terutama dalam upaya menggiring perkembangan ekonomi ke dalam lajur-lajur yang dapat melepaskan kita dari kungkungan krisis ekonomi yang masih membebani. sejalan dengan gagasan-gagasan Menteri Pertanian dan Kehutanan kita selama belum menduduki posisi sekarang, salah satu kendaraan yang dapat diandalkan dalam melalui lajur-lajur tersebut adalah pembangunan sistem agribisnis. Diharapkan bahwa pengembangan sistem agribisnis ini, paling tidak dalam awal pemulihan ekonomi dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang, dapat menyumbang secara nyata pada pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, penguatan devisa dan nilai tukar rupiah, dan sebagainya.

Perspektif Jangka Panjang

Salah satu ciri sektor pertanian, sesuai dengan berbagai kajian empirik, adalah bahwa respon perkembangan komoditas pertanian menjadi nyata pada jangka panjang. Ciri ini juga membedakannya dengan sektor sekunder dan tersier lainnya. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan pertanian (*on-farm*) dan sistem agribisnis secara keseluruhan perlu mengacu pada persepektif jangka panjang tersebut. Itulah sebabnya, berbagai goncangan dan ketidakstabilan jangka pendek, tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, akan sangat mempersulit pembangunan sistem agribisnis. Dengan begitu sudah jelas bahwa stabilitas menjadi kondisi yang pertama yang harus ada dalam suatu pembangunan sistem agribisnis yang dapat diandalkan. Pendekatan-pendekatan

politik ekonomi menjadi sangat penting agar berbagai kebijakan dalam pengembangan sistem agribisnis dapat berjalan lebih mulus.

Modernisasi

Walaupun dikatakan pembangunan sistem agribisnis dapat menjadi salah satu kendaraan utama dalam pemulihan ekonomi jangka panjang, dalam kenyataannya tidaklah demikian mudah mewujudkannya. Salah satu kendalanya adalah bahwa antara subsistem agribisnis yang ada belum terjalin suatu keterkaitan yang sinergis, bahkan bisa yang satu mematikan yang lain. Misalnya, pihak pelaku dalam agroindustri membeli bahan baku dari petani secara monopsonis yang sangat merugikan. Atau pemasok pakan ternak menjual input yang amat penting ini dengan harga monopolis yang amat merugikan peternak. Dengan begitu, pelaku *on-farm*, yakni petani, peternak, dan nelayan selalu dalam posisi yang sangat merugikan sehingga sangat sulit untuk keluar dari keguaman. Padahal, mereka merupakan sebagian besar masyarakat kita.

Jalan keluar yang telah sering dikemukakan oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan kita adalah modernisasi pengembangan sistem agribisnis. Modernisasi tidak hanya introduksi alat dan mesin pertanian dari yang sangat sederhana ke yang paling canggih, seperti pemanfaatan hasil-hasil karya bioteknologi. Modernisasi tanpa perubahan kultur atau sikap-budaya yang menunjang tidak akan berarti banyak seperti yang dialami di India misalnya. Konsekuensi modernisasi adalah bahwa pelaku-pelaku agribisnis akan dihadapkan dengan berbagai bentuk resiko baru yang selama ini belum dikenal dan memerlukan teknik-teknik untuk meredamnya seperti lindung nilai (*hedging*). Modernisasi dalam pembangunan sistem agribisnis juga memerlukan dukungan sistem perdagangan modern yang perlu kita kuasai, baik dalam upaya meredam resiko maupun dalam upaya meraih nilai tambah dari subsistem hilir, yang amat besar nilainya dan selama ini lebih banyak dikuasai pelaku agribisnis di luar negeri.

Modernisasi di *in-farm* (usahatani), pengembangan sistem perdagangan modern agribisnis, alat dan mesin dalam berbagai tingkatan, serta perubahan sikap-budaya atau kultur adalah dimensi modernisasi yang tidak bisa dipisahkan.

Sektor-sektor

Jangan sampai ada persepsi atau tanggapan bahwa yang perlu dimodernisasi hanya petani kecil saja. Mereka berperilaku dan bertindak dalam suasana keguaman karena memang hanya sebatas itulah kesempatan yang mereka miliki. Ditambah lagi, selama masa pemerintahan orde baru, petani kecil serta masyarakat kecil pedesaan dan perkotaan kurang sekali diberi kesempatan untuk belajar mandiri dan belajar demokrasi sehingga banyak

lembaga sosial-ekonomi pedesaan seperti koperasi kurang dapat berkembang. Bahkan mereka sangat tergantung pada uluran tangan dari atas dan merasakan dirinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Banyak indikator menunjukkan bahwa subsektor perkebunan besar, baik pemerintah maupun swasta, subsektor perhutanan, dan subsektor peternakan memerlukan langkah-langkah modernisasi. Banyak sekali cabang-cabang dan ranting-ranting industri, yang pohonnya adalah subsektor di atas, terdapat di luar negeri. Padahal kita tahu yang menghasilkan buah yang amat banyak justru adalah cabang dan ranting tersebut. Dengan kata lain, pihak luar negerilah yang selama ini lebih banyak menikmati nilai tambah yang diciptakan dari berbagai komoditas pertanian kita. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara soal modernisasi maka pada dasarnya seluruh subsektor dalam pertanian dan kehutanan serta seluruh sistem-agribisnisnya memerlukan langkah-langkah menuju modernisasi tersebut. Bahkan subsistem layanan pendukung dan kebijakan juga sangat membutuhkan modernisasi, bila tidak pembangunan sistem agribisnis akan berjalan timpang.

Langkah-langkah

Walaupun demikian luas cakupan dari modernisasi dalam pembangunan sistem agribisnis, tidak berarti kita harus melakukannya secara drastis. Bahkan, seperti telah dikatakan sebelumnya, pembangunan sistem agribisnis haruslah selalu dilihat dalam perspektif jangka panjang. Dengan perkataan lain, yang kita lakukan kini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu jalan panjang pembangunan sistem agribisnis. Tetapi kita harus mengetahui secara persis jalan yang akan kita bangun tersebut. Misalnya, kalau kita membangun gorong-gorong, maka ukuran dan kekuatan gorong-gorong tersebut harus disesuaikan dengan daya tahan jalan serta sistem aliran sungai atau air yang ada di sekitarnya. Selama ini, cara berfikir seperti ini kurang sekali berkembang seperti yang kita lihat di subsektor perkebunan yang dapat dikatakan masih tradisional. Melihat banyaknya masalah dan tantangan yang dihadapi, penetapan prioritas-prioritas menjadi sangat penting.

Langkah *pertama* yang bisa dilakukan adalah dalam kaitannya dengan pengembangan komoditas yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan petani dan peternak. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan benih/bibit dan bakalan unggulan. Misalnya dalam hal padi, petani tidak harus lagi tergantung pada varietas IR yang harganya di pasar agak rendah. Petani seharusnya bisa lebih leluasa untuk menanam varietas lokal yang harganya lebih tinggi dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait. Kita telah ketinggalan jauh dalam pengembangan komoditas ini dan sedikit demi sedikit tergeser oleh impor. Peneliti-peneliti agribisnis, bekerja sama dengan petani, juga sudah harus mulai dengan upaya-upaya mengurangi ketergantungan pada musim seperti untuk tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran; yang dalam waktu dekat diharapkan sudah dapat menunjukkan hasilnya.

Langkah berikutnya, pengorganisasian dan “pendidikan” petani agar lebih memahami dan siap menerima kondisi dan konsekuensi bisnis modern. Mereka harus sudah bisa memulai bagaimana menguasai agribisnis hilir agar mereka dapat meraih nilai tambah yang lebih besar dari produk pertanian yang dihasilkan.

Sejalan dengan itu, pembenahan di subsistem layanan pendukung dan kebijakan juga sudah harus dimulai. Dalam batas tertentu, Departemen Pertanian dan Kehutanan akan perlu menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan lainnya yang dapat dikoordinasikan melalui Menko Ekuin. Salah satunya adalah kebijakan fiskal, moneter dan perbankan.

Masih banyak yang diharapkan dari Menteri Pertanian dan Kehutanan yang baru, seperti misalnya bagaimana mendorong investasi dalam pembangunan sistem agribisnis yang juga memerlukan kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya. Tetapi yang dikemukakan di atas merupakan langkah-langkah kongkrit yang segera dapat dimulai dalam lingkup Departemen Pertanian dan Kehutanan.

Lepas dari itu, kita harapkan pendekatannya bukanlah pendekatan mega proyek seperti di masa lalu yang pada akhirnya juga bahan gerogotan KKN, dan manfaatnya kurang dirasakan oleh petani dan peternak kecil.

Semoga harapan kita ini dapat menyumbang bagi pembangunan sistem agribisnis modern sebagai kendaraan yang dapat diandalkan dalam pemulihan ekonomi.